



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 63 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
- BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 63**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS
PERTANIAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2024 terjadi pandemi Covid-19 yang melanda dunia hingga semua aspek terpengaruh oleh kejadian luar biasa ini. Oleh sebab itu, terjadi perubahan tema pembangunan pada tahun 2022 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022 untuk sektor pertanian yaitu pada peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan serta pariwisata dan jasa produktif lainnya. Dinas Pertanian sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Garut yang bertanggungjawab didalam pengembangan komoditas pertanian akan melakukan langkah-langkah strategis guna pencapaian masyarakat madani daerah sekitar pertanian yang mandiri dan tangguh dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui penggalan potensi sumber daya alam, serta mengembangkan agro ekonomi dalam bentuk agribisnis pedesaan secara berkelanjutan.

Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, pemilihan cara bertindak yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki.

Strategi Pembangunan Pertanian dimaksud diarahkan kepada optimalisasi potensi sumber daya alam di Kabupaten Garut yang sebagian

besar wilayahnya didominasi oleh masyarakat pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan.

Kebijakan umum pengembangan pertanian adalah memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha pertanian, dengan pemberian insentif, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan partisipasi masyarakat pertanian serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Upaya pencapaian target sukses pembangunan pertanian yang meliputi peningkatan swasembada berkelanjutan padi, jagung dan kedelai, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan pertanian juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produksi pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Kabupaten Garut, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur, belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluhan, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar bidang terkait pembangunan pertanian.

Disamping itu, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk

kimiawi dan organik secara seimbang, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan, mengupayakan pencapaian yang mencakup angka kemiskinan dan pengangguran, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Dalam upaya mencapai target dan sasaran seperti diuraikan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta menjawab tantangan di masa depan, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah revitalisasi pertanian, melalui 4 Gerakan Besar yang terdiri dari :

1. **GENTRA YASA** (Gerakan Kemitraan dan Daya Saing) meliputi :
 - a. Kemitraan jagung sebanyak 5.000 ton.
 - b. Ekspor tanaman obat/biofarmaka sebanyak 1.000 ton atau 5% kebutuhan dunia;
 - c. Kemitraan perbenihan kentang industri 1 juta knol atau 20% kebutuhan nasional;
 - d. Pemasaran Green Bean kopi sebanyak 1.000 ton;
 - e. Pemasaran produksi tembakau sebanyak 1.500 ton;
 - f. Pemasaran produksi lump karet sebanyak 1.500 ton;
 - g. Kemitraan pengembangan benih unggul bersertifikat 500.000 pohon;
 - h. Kemitraan pemasaran ubi jalar 500 ton.
2. **GELORA AGRO** (Gerakan Agrowisata dan Agroindustri) meliputi :
 - a. Pengembangan Agrowisata sebanyak 8 kawasan;
 - b. Pengembangan Agroindustri sebanyak 15 Wilayah Kecamatan.
3. **POLA HATI** (Pengadaan Lahan dan Optimalisasi Lahan Tidur) meliputi :
 - a. Pemanfaatan lahan tidur 100 hektar;
 - b. Pengadaan lahan miniature pertanian terpadu di Kecamatan Kadungora 13 hektar;
 - c. Pengadaan lahan dan pembangunan mess TTP seluas 4 hektar.
4. **GARUT NGOREJAT** (Ngomekeun Jeung Ngaropea Cai Pikeun Karaharjaan Rahayat) sumber daya pertanian dan infrastruktur meliputi :

Pengembangan jaringan infrastruktur irigasi pertanian seluas 5.000 hektar;

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi : tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut pada tahun 2022. Oleh karena itu, dokumen Rencana Kerja ini merupakan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Garut dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian pada tahun 2022 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi antar bidang dan sektor terkait (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial).

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perbaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 27/2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut 2019-2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk dijadikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur pertanian dan pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Garut yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah :

1. Mewujudkan visi dan misi Bupati Garut Tahun 2019-2024.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan perencanaan penganggaran.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan pertanian yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud, tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2021.

Bab II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

Menyampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2020 dan capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Garut, analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program kegiatan dari masyarakat.

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan.

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pertanian

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Garut melaksanakan sebanyak 10 program dan 61 kegiatan dengan anggaran atau pagu sebesar Rp. 22.781.091.033.

Adapun anggaran dan realisasi program Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capain
	2020	2020	2020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.341.480.800	1.087.989.735	81,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	841.440.000	824.165.131	97,95
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	179.585.000	146.217.000	81,42
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	104.035.000	103.125.000	99,13
Peningkatan Kualitas Bahan Baku	4.633.764.472	4.551.050.400	98,21
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Dan Daya Saing Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	1.612.707.500	1.585.327.304	98,30
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Dan Daya Saing Tanaman Pangan Berkelanjutan	830.080.000	819.848.000	98,77
Program Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian	11.420.821.661	11.235.634.363	98,38
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian	997.810.000	588.021.000	58,93
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Dan Daya Saing Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	819.366.600	815.337.950	99,51
JUMLAH	22.781.091.033	21.756.715.883	95,50

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Garut

**Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TAHUN 2020
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GARUT**

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENTSRA TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d 2020	
					TARGET RENJA TAHUN 2020	REALISASI RENJA TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
3.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTOR		1.519.090.000	839.766.013	1.341.480.800	1.087.989.735	81,10	1.148.800.000	1.927.755.748	126,90
3.03.3.03.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	10.761.000	1.755.000	2.900.000	2.349.000	81,00	7.000.000	4.104.000	38,14
3.03.3.03.01.01.02.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	338.207.000	82.564.283	147.000.000	95.106.820	64,70	220.000.000	177.671.103	52,53
3.03.3.03.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	36.750.000	28.078.000	56.865.000	39.798.500	69,99	35.000.000	67.876.500	184,70
3.03.3.03.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terfasilitasnya Petugas dan Jasa Kebersihan Kantor	102.103.000	76.236.280	128.000.000	127.453.200	99,57	84.000.000	203.689.480	199,49
3.03.3.03.01.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	76.865.000					55.000.000		
3.03.3.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor	127.628.000	97.077.350	90.000.000	89.680.850	99,65	100.000.000	186.758.200	146,33
3.03.3.03.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	197.824.000	149.360.000	128.000.000	125.399.500	97,97	155.000.000	274.759.500	138,89
3.03.3.03.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Alat Listrik dan Elektronik	17.230.000	12.524.000	13.500.000	13.462.000	99,72	13.500.000	25.986.000	150,82
3.03.3.03.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.391.000	139.727.800	232.786.800	223.630.761	96,07	110.000.000	363.358.561	258,82
3.03.3.03.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12.763.000	9.600.000	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	19.600.000	153,57
3.03.3.03.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	153.154.000	97.775.000	85.600.000	70.300.000	82,13	120.000.000	168.075.000	109,74
3.03.3.03.01.01.19.	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi/Teknis	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi/Teknis	185.061.000	98.342.300	399.600.000	248.016.875	62,07	145.000.000	346.359.175	187,16
3.03.3.03.01.01.79.	Penyediaan Jasa Publikasi	Jasa Pengumuman /Iklan	4.850.000	3.600.000	8.400.000	5.900.000	70,24	3.800.000	9.500.000	195,88
3.03.3.03.01.01.92.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	115.503.000	43.126.000	38.829.000	36.892.229	95,01	90.500.000	80.018.229	69,28

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENTSRA TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d 2020	
					TARGET RENJA TAHUN 2020	REALISASI RENJA TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
3.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		16.406.412.000	7.349.795.460	841.440.000	824.165.131	97,95	13.080.000.000	8.173.960.591	49,82
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	486.203.000					400.000.000		
3.03.3.03.01.02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	911.630.000		480.000.000	479.250.000	99,84	750.000.000	479.250.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	109.396.000					90.000.000		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	109.396.000					90.000.000		
	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	267.411.000					220.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	607.753.000	55.000.000				500.000.000	55.000.000	9,05
3.03.3.03.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	121.551.000	82.000.000	105.000.000	104.628.631	99,65	100.000.000	186.628.631	153,54
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	66.853.000					55.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	66.853.000					55.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	66.853.000					55.000.000		
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	775.000.000					220.000.000		
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	133.706.000					110.000.000		
	Penataan Ruang Gedung Kantor	Terpenuhinya Penataan Ruang Gedung Kantor	133.706.000	389.847.000				110.000.000	389.847.000	291,57
3.03.3.03.01.02.232.	Unit Pelayanan Terpadu Agribisnis (ULTA) Pertanian	Terpenuhinya Unit Pelayanan Terpadu Agribisnis (ULTA) Pertanian	334.264.000	278.556.000	256.440.000	240.286.500	93,70	275.000.000	518.842.500	155,22

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENTSRA TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d 2020	
					TARGET RENJA TAHUN 2020	REALISASI RENJA TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	Pembangunan / Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian	Terpenuhinya Pembangunan / Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian	1.215.506.000					1.000.000.000		
	Sistem informasi kepegawaian, pelayanan, pemasaran	Terpenuhinya Sistem informasi kepegawaian, pelayanan, pemasaran	60.775.000					50.000.000		
	Pengadaan Lahan Miniatur Pertanian	Terpenuhinya Pengadaan Lahan Miniatur Pertanian	10.939.556.000	6.544.392.460				9.000.000.000	6.544.392.460	59,82
03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		290.000.000	89.728.100	-	-	-	50.000.000	89.728.100	30,94
03.01.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas	290.000.000	89.728.100				50.000.000	89.728.100	
03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		530.000.000	219.700.450	-	-	-	50.000.000	219.700.450	41,45
03.01.05.010	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Aparatur	530.000.000	219.700.450				50.000.000	219.700.450	41,45
03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD		334.265.000	75.000.000	104.035.000	103.125.000	99,13	275.000.000	178.125.000	53,29
3.03.3.03.01.07.006	Peyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (DAU)	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	121.551.000		16.845.000	15.935.000	94,60	100.000.000	15.935.000	
3.03.3.03.01.07.010	Peyusunan Data Base Statistik Pertanian (DAU)	Terpenuhinya data statistik	91.163.000	75.000.000	87.190.000	87.190.000	100,00	75.000.000	162.190.000	177,91
03.01.07	Pengembangan Aplikasi Berbasis Web (DAU)		121.551.000					100.000.000		
03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		875.000.000	240.159.400	179.585.000	146.217.000	81,42	275.000.000	386.376.400	44,16
3.03.3.03.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah junis laporan capaian kinerja dan realisasi dan keuangan SKPD (Lakip 2019, LPPD 2019, Laporan Kinerja Triwulan, Laporan Kinerja Semesteran dan Laporan Tahunan 2020)	125.000.000		44.600.000	26.832.000	60,16	100.000.000	26.832.000	21,47
03.01.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran)	250.000.000					75.000.000	-	

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENTSRA TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d 2020	
					TARGET RENJA TAHUN 2020	REALISASI RENJA TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
3.03.3.03.01.06.012.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Evaluasi pertanian Kabupaten Garut	500.000.000	240.159.400	134.985.000	119.385.000	88,44	100.000.000	359.544.400	71,91
3.03.3.03.01.37.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN		10.122.867.000	2.033.211.150	830.080.000	819.848.000	98,77	6.645.000.000	2.853.059.150	28,18
3.03.3.03.01.37.01.	Pengelolaan lahan balai benih pembantu tanaman pangan	Produktivitas padi	500.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	100,00	135.000.000	180.000.000	36,00
3.03.3.03.01.37.02.	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman	Produktivitas padi	900.000.000	187.251.250	405.180.000	403.053.000	99,48	150.000.000	590.304.250	65,59
3.03.3.03.01.37.03.	Pengembangan Kawasan komoditas padi	Produktivitas padi	668.528.000	396.874.900	200.000	200.000	100,00	550.000.000	397.074.900	59,40
	Akselerasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan	Produktivitas padi	1.600.000.000	1.281.735.000				500.000.000	1.281.735.000	80,11
3.03.3.03.01.37.04.	Pengembangan Kawasan komoditas jagung	Produktivitas Jagung	559.133.000		160.000	160.000	100,00	460.000.000	160.000	0,03
	Pengembangan Kawasan komoditas kacang tanah	Produktivitas Kacang Tanah	3.889.620.000					3.200.000.000		
3.03.3.03.01.37.07.	Pengembangan Kawasan komoditas ubi jalar	Produktivitas Ubi Jalar	546.978.000		30.390.000	30.390.000	100,00	450.000.000	30.390.000	5,56
	Pengembangan Kawasan komoditas ubi kayu	Produktivitas Ubi Kayu	546.978.000					450.000.000		
3.03.3.03.01.37.08.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing	Produktivitas Hsil Tanaman Pangan	546.978.000	77.350.000	304.150.000	296.045.000	97,34	450.000.000	373.395.000	68,27
	Pengembangan Alat Pasca Panen dan Pengolahan Tanaman Pangan	Produktivitas Hsil Tanaman Pangan	364.652.000					300.000.000		
3.03.3.03.01.34.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN		27.140.000.000	1.167.051.325	1.612.707.500	1.585.327.304	98,30	8.224.675.000	1.484.617.925	5,47
	Pengembangan sistem perbenihan Cabai	Produktivitas Cabai	100.000.000					100.000		
	Pengembangan Kawasan Cabai	Produktivitas Cabai	1.690.000.000					1.690.000		
	Pengembangan sistem perbenihan Bawang Merah	Produktivitas Bawang Merah	1.180.000.000					900.000		
	Pengembangan Kawasan Bawang Merah	Produktivitas Bawang Merah	1.120.000.000					1.120.000		
3.03.3.03.01.34.08.	Pengembangan sistem perbenihan Kentang	Produktivitas Kentang	780.000.000	257.814.825	610.287.500	597.148.340	97,85	11.770.000	257.814.825	33,05
	Pengembangan Kawasan Kentang	Produktivitas Kentang	2.810.000.000					1.130.000		
	Pengembangan sistem perbenihan Sayuran Lainnya	Produktivitas Sayuran Lainnya	1.320.000.000	198.844.000				1.835.000	198.844.000	15,06
	Pengembangan Kawasan Sayuran Lainnya	Produktivitas Sayuran Lainnya	1.985.000.000					1.130.000		

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENTSRA TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d 2020	
					TARGET RENJA TAHUN 2020	REALISASI RENJA TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
3.03.3.03.01.34.012.	Pengembangan Kawasan Jahe	Produktivitas Jahe	2.450.000.000		46.030.000	46.030.000	100,00	770.000.000	46.030.000	1,88
3.03.3.03.01.34.013.	Pengembangan Kawasan Kunyit	Produktivitas Kunyit	2.450.000.000		146.870.000	146.586.600	99,81	770.000.000	146.586.600	5,98
	Pengembangan Kawasan Tanaman Obat Lainnya	Produktivitas Obat Lainnya	2.450.000.000					770.000.000		
3.03.3.03.01.34.015.	Pengembangan sistem perbenihan Jeruk	Produktivitas Jeruk	980.000.000	40.000.000	197.400.000	190.892.864	96,70	700.000.000	40.000.000	4,08
3.03.3.03.01.34.016.	Pengembangan Kawasan Jeruk	Produktivitas Jeruk	2.000.000.000	199.844.000	90.285.000	88.507.000	98,03	1.400.000.000	199.844.000	9,99
	Pengembangan sistem perbenihan Buah Lainnya	Produktivitas Buah Lainnya	980.000.000					750.000.000		
3.03.3.03.01.34.019.	Pengembangan Kawasan Buah Lainnya	Produktivitas Buah Lainnya	1.750.000.000	99.850.000	396.175.000	391.212.500	98,75	1.150.000.000	99.850.000	5,71
	Pengembangan Kawasan Sedap Malam	Produktivitas Sedap Malam	1.160.000.000					560.000.000		
	Pengembangan Kawasan Tanaman Hias lainnya	Produktivitas Tanaman Hias Lainnya	1.160.000.000					560.000.000		-
	Pengembangan Agroindustri Berbahan Baku Hasil Hortikultura	Produktivitas Olahan Hortikultura	125.000.000					125.000.000		
3.03.3.03.01.34.023.	Pemasaran dan pengolahan Hasil Hortikultura	Produktivitas Olahan Hortikultura	200.000.000		125.660.000	124.950.000	99,43	200.000.000	124.950.000	62,48
	Pelatihan dan bimbingan GHP hortikultura	Produktivitas Olahan Hortikultura	150.000.000	370.698.500				150.000.000	370.698.500	247,13
	Bantuan Sarana Produksi dan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Produktivitas Olahan Hortikultura	300.000.000					300.000.000		
3.03.3.03.01.41.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN		7.633.380.000	1.581.521.750	819.366.600	815.337.950	99,51	6.280.000.000	1.581.521.750	20,72
	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Kopi	Produktivitas Kopi	2.127.136.000	228.076.300				1.750.000.000	228.076.300	10,72
	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Teh	Produktivitas Teh	850.854.000					700.000.000		
	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan Penyegar Lainnya	Produktivitas Tanhugar Lainnya	243.101.000	236.529.500				200.000.000	236.529.500	97,30
	Pengendalian OPT dan Dampak Iklim Pada Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	Produktivitas Tanhugar Lainnya	121.551.000	97.228.600				100.000.000	97.228.600	79,99
3.03.3.03.01.41.005.	Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Perkebunan	Produktivitas Kopi	607.753.000	389.774.900	178.450.000	177.005.850	99,19	500.000.000	389.774.900	64,13
	Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim dan Aneka Rempah	Produktivitas Tansimpah Lainnya	850.854.000					700.000.000		
	Penerapan Teknologi GAP Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Produktivitas Tembakau	212.714.000					175.000.000		

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENTSRA TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d 2020	
					TARGET RENJA TAHUN 2020	REALISASI RENJA TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	Penerapan Teknologi Tanaman Atsiri	Produktivitas Atsiri	158.016.000					130.000.000		
	Penerapan GAP Tanaman Atsiri	Produktivitas Atsiri	182.326.000					150.000.000		
	Pengendalian OPT dan Dampak Iklim Pada Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	Produktivitas Tansimpah Lainnya	121.551.000					100.000.000		
3.03.3.03.01.41.011.	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Produktivitas Hsil Olahan Perkebunan	1.093.956.000	91.603.000	395.731.000	394.311.000	99,64	900.000.000	91.603.000	8,37
3.03.3.03.01.41.012.	Pengembangan Agrowisata Tanamn Perkebunan	Produktivitas Kopi	121.551.000		245.185.600	244.021.100	99,53	100.000.000		
	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Produktivitas Tanhugar Lainnya	850.854.000	538.309.450				700.000.000	538.309.450	63,27
	Peningkatan Mutu Hasil Produksi Perkebunan	Produktivitas Tansimpah Lainnya	91.163.000					75.000.000		
	Klasifikasi Perkebunan Besar	Produktivitas Teh	250.000.000							
3.03.3.03.01.32.	PROGRAM PENIGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU		13.067.152.000	5.745.517.078	4.633.764.472	4.551.050.400	98,21	11.075.000.000	5.745.517.078	43,97
3.03.3.03.01.32.010.	Penerapan Inovasi Teknis	Produktivitas Tembakau	364.652.000	442.181.300	200.000.000	188.291.750	94,15	300.000.000	442.181.300	121,26
3.03.3.03.01.32.001.	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau	Produktivitas Tembakau	790.079.000	882.026.650	600.000.000	596.710.795	99,45	650.000.000	882.026.650	111,64
	Bantuan Sarana Produksi dan Fasilitasi Promosi Bagi Tanaman Tembakau	Produktivitas Tembakau	700.000.000	645.345.690				625.000.000	645.345.690	92,19
	Pelatihan Pengelolaan Pasca Panen tanaman Tembakau	Produktivitas Tembakau	400.000.000	391.107.590				250.000.000	391.107.590	97,78
3.03.3.03.01.32.020.	Penerapan Teknologi GAP Tanaman Tembakau	Produktivitas Tembakau	2.066.361.000	197.191.148	533.764.472	492.388.555	92,25	1.700.000.000	197.191.148	9,54
3.03.3.03.01.32.002.	Peningkatan Kapasitas Jalan Produksi/Usaha Perkebunan	Produktivitas Tembakau	6.077.531.000	703.799.000	2.600.000.000	2.575.708.800	99,07	5.000.000.000	703.799.000	11,58
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Produktivitas Tembakau	2.000.000.000	1.838.008.000				2.000.000.000	1.838.008.000	91,90
3.03.3.03.01.32.014.	Fasilitasi Indikasi Geografis Tembakau	Produktivitas Tembakau	182.326.000	96.432.500	100.000.000	99.105.500	99,11	150.000.000	96.432.500	52,89
3.03.3.03.01.32.009.	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	Produktivitas Tembakau	486.203.000	549.425.200	200.000.000	200.000.000	100,00	400.000.000	549.425.200	113,00
3.03.3.03.01.32.023.	Pembangunan Embung Dan Sarana Sumber Air (DBHCHT)	Produktivitas Tembakau	400.000.000		200.000.000	199.422.500	99,71	200.000.000	200.000.000	50,00
3.03.3.03.01.32.023.	Pembangunan Embung Dan Sarana Sumber Air (DBHCHT)	Produktivitas Tembakau	400.000.000		200.000.000	199.422.500	99,71	200.000.000	200.000.000	50,00
03.01.07.03	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL		1.055.000.000	981.167.000	-	-	-	1.025.000.000	981.167.000	93,00
	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Produktivitas Tembakau	300.000.000	134.180.000				300.000.000	134.180.000	44,73
	Pemanfaatan Limbah Tembakau Menjadi Pestisida Nabati Beserta Aplikasi pada Komoditas Sayuran (DBHCHT)	Produktivitas Tembakau	230.000.000	144.242.000				300.000.000	144.242.000	62,71

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENTSRA TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d 2020	
					TARGET RENJA TAHUN 2020	REALISASI RENJA TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d 2020	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	Bimbingan Teknis Perbenihan/ Pembibitan (DBHCHT)	Produktivitas Tembakau	375.000.000	273.575.000				275.000.000	273.575.000	72,95
	Bantuan Sarana Produksi dan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Produktivitas Tembakau	150.000.000	429.170.000				150.000.000	429.170.000	286,11
3.03.3.03.01.38.	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PERTANIAN		29.399.000.000	11.159.658.950	11.420.821.661	11.235.634.363	98,38	30.229.000.000	11.159.658.950	37,96
3.03.3.03.01.38.01.	Pengembangan Sarana Pertanian	Indeks Pertanaman	2.345.000.000	190.423.000	568.138.000	567.333.000	99,86	1.875.000.000	190.423.000	8,12
3.03.3.03.01.38.011.	Peningkatan Prasarana Pemasaran Hasil Pertanian	Indeks Pertanaman	650.000.000	538.309.450	2.036.029.659	2.023.839.659	99,40	900.000.000	538.309.450	82,82
3.03.3.03.01.38.04.	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	Indeks Pertanaman	500.000.000		162.315.000	161.657.000	99,59	500.000.000		
	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan	Indeks Pertanaman	400.000.000	149.000.000				1.750.000.000	149.000.000	37,25
3.03.3.03.01.38.05.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Pertanaman	7.500.000.000	6.894.641.500	5.567.816.002	5.541.916.004	99,53	7.500.000.000	6.894.641.500	91,93
3.03.3.03.01.38.06.	Integrated Participatory Development and Managemen of Irrigatio Project	Indeks Pertanaman	1.454.000.000	707.285.000	1.046.523.000	901.620.700	86,15	1.454.000.000	707.285.000	48,64
3.03.3.03.01.38.07.	Pengembangan sumber-Sumber Air (DAK)	Indeks Pertanaman	6.300.000.000	2.680.000.000	1.840.000.000	1.840.000.000	100,00	6.000.000.000	2.680.000.000	42,54
	Pembangunan Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND)	Indeks Pertanaman	10.000.000.000					10.000.000.000		
	Pendampingan Pembangunan Pertanian Terpadu di Dataran Tinggi (UPLAND)	Indeks Pertanaman	250.000.000					250.000.000		
3.03.3.03.01.38.015.	Optimalisasi Lahan Melalui Pemanfaatan Sumber-Sumber Air	Indeks Pertanaman	400.000.000		200.000.000	199.268.000	99,63	200.000.000	199.268.000	49,82
3.03.3.03.01.39.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN		3.598.139.000	793.890.000	946.563.000	588.021.000	62,12	3.848.139.000	822.916.000	22,87
3.03.3.03.01.39.01.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	1.237.139.000	307.075.000	791.070.000	504.835.000	63,82	1.237.139.000	307.075.000	24,82
	Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	250.000.000	131.665.000				250.000.000	131.665.000	52,67
3.03.3.03.01.39.03.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1.541.000.000	308.000.000	71.000.000	54.160.000	76,28	1.791.000.000	308.000.000	19,99
	Penunjang Kegiatan IPDMIP (Integrited Participatory Development and Managemen of Irrigatio Project) (DI)	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	120.000.000	47.150.000,00				120.000.000	47.150.000,00	39,29
3.03.3.03.01.39.04.	Pengembangan Pusat Edukasi Pertanian	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	450.000.000		84.493.000	29.026.000	34,35	450.000.000	29.026.000	6,45

RINCIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

a) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.341.480.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.087.989.735,- atau sebesar 81,10 % yang diimplementasikan ke dalam, yaitu :

- 1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 2.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.349.000,- atau sebesar 81,00 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah pencapaian skor IKM melalui kegiatan sebesar 82,00 %;
- 1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 147.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.106.820,- atau sebesar 64,70 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya jasa komunikasi, Tersedianya Jasa air dan Tersedianya jasa Listrik dan tersedianya jasa internet selama 12 bulan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,00%;
- 1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 59.56.865.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.798.500,- atau sebesar 69,99 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perpanjangan STNK sebanyak 251 unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,00 %;
- 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.128.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 127.453.200,- atau sebesar 99,57 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya petugas jasa kebersihan kantor sebanyak 7 orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,00 %;
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 89.680.850,- atau sebesar 99,65 %. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan alat tulis kantor selama 12 bulan. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,00 %;
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. 128.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 125.399.500,- atau sebesar 97,97 %. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah belanja cetak dan penggandaan selama 12 bulan. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

sebesar 82,00 %;

- 1.7 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebesar Rp. 13.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.462.000,- atau sebesar 99,72 %. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah belanja alat listrik dan elektronik sebanyak 6 unit, terpenuhinya jasa instalasi listrik selama 12 bulan. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 7,52 %;
- 1.8 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp. 232.786.800 terealisasi sebesar Rp. 223.630.761,- atau sebesar 96,07 %. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah pengadaan alat rumah tangga, pengadaan meubeulair, pengadaan komputer, printer, scanner dan Notebook. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 7,52 %;
- 1.9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar 100 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya bahan bacaan sebanyak 4 media per bulan. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,00 %;
- 1.10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 85.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.300.000,- atau sebesar 82,13 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah penyediaan makanan dan minuman rapat sebanyak 2.500 porsi. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,00 %;
- 1.11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah sebesar Rp. 38.829.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.892.229,- atau sebesar 95,01 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi antar daerah. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini terjadinya koordinasi dan konsultasi antar daerah selama 12 bulan, Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 5,56 %;
- 1.12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis/Administrasi sebesar Rp. 399.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 248.016.875,- atau sebesar 62,07 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan barang dan jasa. Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini penyediaan barang jasa dan honorarium non pns selama 12 bulan, Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya cakupan layanan administrasi perkantoran sebesar 5,56 %;
- 1.13 Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi sebesar Rp. 8.400.000 terealisasi sebesar Rp. 5.900.000 atau sebesar 70,24 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya jasa pengumuman/iklan sebanyak 6 kali.

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,00 %;

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 841.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 824.165.131,- atau sebesar 97,95 % yang diimplementasikan ke dalam yaitu :

- 2.1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 480.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 479.250.000,- atau sebesar 99,84 %. Sasaran kegiatan ini yaitu Kendaraan Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 1 unit. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,00%
- 2.2 Kegiatan Unit Pelayanan Terpadu Agribisnis dengan anggaran sebesar Rp. 256.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 240.286.500,- atau sebesar 93,70 %. Lokasi Kegiatan Seluruh Kecamatan di Kabupaten Garut. Output dengan jumlah lokasi penanganan pelayanan terpadu agribisnis pertanian di 42 kecamatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 82,00%.

3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 179.585.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 146.217.000,- atau sebesar 81,42 % yang diimplementasikan ke dalam, yaitu :

- 3.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 44.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.832.000,- atau sebesar 60,16 %. Sasaran kegiatan ini adalah Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya honorarium pegawai honorer/tidak tetap. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 75,00 %.
- 3.2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran sebesar Rp. 134.985.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 119.385.000,- atau sebesar 88,44 %. Sasaran kegiatan ini adalah Dinas Pertanian. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya honorarium pegawai honorer/tidak tetap. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 75,00 %.

4. **Program Peningkatan Perencanaan SKPD**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 104.035.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 103.125.000,- atau sebesar 99,13 % yang diimplementasikan ke dalam, yaitu :

- 4.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 16.845.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.935.000,-. Lokasi dari Kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 75,00 %;
- 4.2 Kegiatan Penyusunan Data Base Statistika Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 87.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 87.190.000,-. Lokasi dari Kegiatan ini yaitu Dinas Pertanian. Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pembahasan sasaran intensifikasi pertanian dan perkebunan tahun 2019, adanya buku data base pertanian sebanyak 12 buku, adanya buku data base perkebunan sebanyak 6 buku, terlaksananya pertemuan whorkshop pengumpul dan pengolah data pertanian dan perkebunan sebanyak 1 angkatan 1 kali, adanya buku penyajian data bulanan sebanyak 24 buku, adanya buku statistic perkebunan sebanyak 100 buku. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 75,00 %;

5. **Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku**

Program ini mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 4.633.764.472,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.551.050.500,- atau sebesar 98,21 % yang diimplementasikan kedalam kegiatan:

- 5.1 Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku tembakau (DBHCHT) dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 596.710.795,- atau sebesar 99,45 %. Lokasi dari kegiatan ini adalah Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler. Output dari kegiatan ini adalah Adopsi Inovasi Pemasaran dan Kemitraan, Gedung UPH Rajang Tembakau, Mesin Rajang Kasar Tembakau, Gedung Penyimpanan Produksi Tembakau, Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan hasil produksi olahan tanaman perkebunan sebanyak 150 ton.
- 5.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan Produksi/Usaha Perkebunan Pada Lahan Tembakau (DBHCHT), dengan anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.575.708.800,- atau sebesar 99,07 %. Lokasi kegiatan ini adalah Desa Mekarluyu Kecamatan Sukawening, Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk, Desa Kandangmukti Kecamatan Leles, Desa Pelita Asih Kecamatan Selaawi, Desa Sukahurip Kecamatan Pangatikan, Desa Bayongbong Kecamatan Bayongbong, Desa Panjiwangi Kecamatan TARogong Kaler, Desa Sindanggalih Kecamatan Karangtengah, Desa Tenjonagara Kecamatan Sucinaraja, Desa Sukalilah Kecamatan Sukaresmi, Desa Tanjungkarya Kecamatan Samarang, Desa Sukakarya Kecamatan Banyuresmi, Desa Sindangpalay Kecamatan Karangpawitan dan Desa Sudalarang Kecamatan Sukawening. Output kegiatan ini yaitu pengadaan konsultan perencanaan dan pengawasan peningkatan kapasitas jalan usaha / produksi perkebunan, adanya konstruksi kapasitas jalan usaha / produksi perkebunan di empat lokasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah produksi tanaman tembakau sebanyak 3.138 ton;

- 5.3 Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT), dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- atau sebesar 100 %. Output kegiatan ini yaitu Jumlah dan peserta Rapat kerja Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Garut 3 kali/50orang, Jumlah Penumbuhan dan Penguatan DPP APTI 24 kali/720 orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah produksi tanaman tembakau sebanyak 3.138 ton;
- 5.4 Kegiatan Penerapan Inovasi Teknis (DBHCHT), dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 188.291.750,- atau sebesar 94,15. Output kegiatan ini yaitu jumlah varietas Tembakau Unggul yang disertifikasi 5 Varietas, jumlah varietas Tembakau Unggul yang dikembangkan 1 Varietas, Jumlah Varietas tanaman Tembakau yang dimurnikan 5 varietas, Sebar Demplot Pembenihan Tembakau Sistem Tray 10 kecamatan, Jumlah KT yang mendapat sosialisasi penggunaan benih unggul tembakau 10 KT. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi tanaman tembakau sebanyak 3.138 ton;
- 5.5 Kegiatan Fasilitasi Indikasi Geografis Tembakau (DBHCHT), dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.105.500,- atau sekita 99,11 %. Lokasi kegiatan Kecamatan Leles. Output kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen profil data indikasi geografis tanaman tembakau sebanyak 1 Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah produksi tanaman tembakau sebanyak 3.138 ton;
- 5.6 Kegiatan Penerapan Teknologi GAP Tanaman Tembakau (DBHCHT), dengan anggaran sebesar Rp. 533.764.472,- dengan realisasi sebesar Rp. 492.388.555,- atau sekita 92,25 %. Lokasi kegiatan Kecamatan Cilawu, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Samarang, Kecamatan Pasirwangi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kecamatan Wanaraja, Kecamatan Pangatikan, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Leles, Kecamatan Kadungora, Kecamatan Cibiuk, Kecamatan Limbangan, Provinsi Jawa Tengah. Output kegiatan ini yaitu Bimbingan Teknis 2 Angkatan, Demplot Budidaya Tembakau Varietas Baru seluas 5 Hektar, Hibah Sarana Produksi Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman Tembakau seluas 15 Hektra, Magang Operator Laboratorium Uji Kadar Nikotin (5 Hari) 4 Orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah produksi tanaman tembakau sebanyak 3.138 ton;
- 5.7 Kegiatan Pembangunan Embung Dan Sarana Sumber Air (DBHCHT), dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.422.500,- atau sebesar 99,71%. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dalam pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan ekonomi. Output kegiatan ini yaitu Jumlah Pipa PVC sebanyak 1.600 batang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi tanaman tembakau sebanyak 3.138 ton;
- 5.8 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Sarana Irigasi (Tersier/Kwartir) (DBHCHT), dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.422.500,- atau sebesar 99,71%. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dalam pemberdayaan masyarakat

untuk pemulihan ekonomi. Output kegiatan ini yaitu Jumlah Pipa PVC sebanyak 1.600 batang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi tanaman tembakau sebanyak 3.138 ton;

6. Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Dan Daya Saing Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.612.707.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.585.327.304,- atau sebesar 98,30 % yang diimplementasikan ke dalam, yaitu :

- 6.1 Kegiatan Pengembangan sistem perbenihan Kentang, dengan anggaran sebesar Rp. 610.287.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 597.148.340,- atau sebesar 97,85 %. Lokasi kegiatan di kecamatan Cikajang dan Cisarupan Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Bibit Kentang sebanyak 300.000 knol, Penangkaran Bibit Kentang 1 unit, Jumlah Bangunan Instalasi Pengolahan Pupuk Organik 1 unit, Jumlah Alat Pengolahan Tanah dan Pemeliharaan Tanaman 1 paket dan Pengadaan Benih Kentang G0 sebanyak 60.000 knol. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi tanaman kentang sebanyak 182.373 ton;
- 6.2 Kegiatan Pengembangan Kawasan Jahe, dengan anggaran sebesar Rp. 46.030.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.030.000,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang terdampak efisiensi penanganan pandemi Covid-19. Lokasi kegiatan di Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Singajaya, Kecamatan Pakenjeng, Kecamatan Cisompet, dan Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi kegiatan sebanyak 1 kali dan bimbingan teknis budidaya jahe sebanyak 20 kali. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi tanaman jahe sebanyak 7.085 ton;
- 6.3 Kegiatan Pengembangan Kawasan Kunyit, dengan anggaran sebesar Rp. 146.870.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 146.586.600,- atau sebesar 99,81 %. Lokasi kegiatan di Kecamatan Kersamanah, Malangbong, Limbangan dan Selaawi Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi kegiatan sebanyak 1 kali, bimbingan teknis budidaya jahe sebanyak 20 kali, Pengadaan Pupuk sebanyak 23.400 kg dan Pengadaan NPK 800 kg. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi tanaman kunyit sebanyak 3.609 ton;
- 6.4 Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Jeruk, dengan anggaran sebesar Rp. 197.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.892.864,- atau sebesar 96,70 %. Lokasi kegiatan di Kecamatan Karangpawitan, Wanaraja, Cikajang, Cisarupan Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kebutuhan Mata Tempel Jeruk sebanyak 180.000 enteres, Jumlah Peserta Diklat/Bimtek Petani Penangkar Jeruk sebanyak 25 orang dan Jumlah Rehabilitasi Pohon Induk sebanyak 500 pohon. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi tanaman kunyit sebanyak 214.267 ton;
- 6.5 Kegiatan Pengembangan Kawasan Jeruk, dengan anggaran sebesar Rp. 90.285.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.507.000,- atau sebesar 98,03 %. Lokasi kegiatan di Kecamatan Karangpawitan dan Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Output

dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tingkat Kabupaten sebanyak 240 orang, Jumlah Peserta Gerakan Pengendalian OPT sebanyak 300 orang dan Jumlah Pestisida Jeruk sebanyak 100 pohon. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi tanaman kunyit sebanyak 214.267 ton;

- 6.6 Kegiatan Pengembangan Kawasan Buah Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 396.175.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 391.212.500,- atau sebesar 98,75 %. Lokasi kegiatan di Kecamatan Cigedug, Kecamatan Cisurupan, Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Cikajang dan Kec Cilawu Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimtek GAP Alpukat sebanyak 250 orang, Jumlah Bantuan Bibit Alpukat sebanyak 6.500 pohon, Jumlah Bantuan Bibit Durian 200 pohon, Jumlah Bantuan Bibit Nangka 250 pohon, Jumlah Bantuan Bibit Jeruk sebanyak 1.000 pohon, Jumlah Bantuan Pupuk Organik 77.000 kilogram dan Jumlah Bantuan Pupuk NPK sebanyak 5.200 kilogram. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi tanaman buah lainnya sebanyak 17.180 ton;
- 6.7 Kegiatan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura, dengan anggaran sebesar Rp. 125.660.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.950.000,- atau sebesar 99,43 %. Lokasi kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Agroedukasi sebanyak 3 kali, dan Temu Bisnis sebanyak 3 kali. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi produk olahan hortikultura sebanyak 571.785 ton.

7. **Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Dan Daya Saing Tanaman Pangan Berkelanjutan**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 830.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 819.848.000,- atau sebesar 98,77 % yang diimplementasikan ke dalam, yaitu :

- 7.1 Kegiatan Pengelolaan Lahan Balai Benih Pembantu Tanaman Pangan, dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 90.000.000,- atau sebesar 100 %. Lokasi kegiatan ini adalah Ds. Kertajaya Kecamatan Cbatu dan Ds. Jatimulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah luasan penangkaran benih padi (benih pokok) seluas 8 hektar dan Jumlah calon benih padi (benih pokok) yang tersedia 31.200 kilogram. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi padi sebanyak 676.259 Ton;
- 7.2 Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman, dengan anggaran sebesar Rp. 405.180.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 403.053.000,- atau sebesar 99,48 %. Lokasi kegiatan ini adalah Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah benih padi (SS) sebanyak 500 kilogram, Luas penangkaran benih padi seluas 20 hektar dan Pengadaan Pupuk Hayati sebanyak 1.400 sachet.. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produksi padi sebanyak 676.259 Ton;
- 7.3 Kegiatan Pengembangan Kawasan Komoditas Padi, dengan anggaran tersisa sebesar Rp. 200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 200.000,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan salah satu

kegiatan yang berdampak efisiensi penanganan pandemi Covid-19;

- 7.4 Kegiatan Pengembangan Kawasan Komoditas Jagung, dengan anggaran tersisa sebesar Rp. 160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 160.000,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang berdampak efisiensi penanganan pandemi Covid-19;
- 7.5 Kegiatan Pengembangan Kawasan Komoditas Ubi Jalar, dengan anggaran tersisa sebesar Rp. 30.390.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.390.000,- atau sebesar 100 %. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang berdampak efisiensi penanganan pandemi Covid-19. Lokasi kegiatan ini adalah Kecamatan Pakenjeng, Cilawu, Pamulihan, Pasirwangi dan Banjarwangi Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah peserta bimbingan teknis budidaya ubi jalar sebanyak 125 orang, Luas penangkaran benih padi seluas 20 hektar dan Pengadaan Pupuk Hayati sebanyak 1.400 sachet.. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adanya produksi ubi jalar sebanyak 7.125,5 Ton;
- 7.6 Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing, dengan anggaran tersisa sebesar Rp. 304.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 296.045.000,- atau sebesar 97,34 %. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang berdampak efisiensi penanganan pandemi Covid-19. Lokasi kegiatan ini adalah Kecamatan Peundeuy, Sukawening, Banjarwangi, Singajaya, Banyuresmi, dan Cibatub Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Pengadaan Alat Pascapanen Tanaman Pangan sebanyak 8 unit, Pelatihan Alat Pengolahan sebanyak 6 kelompok dan Pelatihan Alat Pengolahan sebanyak 6 kelompok. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adanya produksi padi sebanyak 676.259 Ton.

8. **Program Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 11.420.821.661,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.235.634.363,- atau sebesar 98,38 % yang diimplementasikan ke dalam, yaitu :

- 8.1 Kegiatan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 568.138.000,- terealisasi Rp. 567.333.000,- atau sebesar 99,33 %. Kecamatan Bayongbong. Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya Pembangunan Gudang dan Perbengkelan Alsintan seluas 180 m²,. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebanyak 3.684.520 ton;
- 8.2 Kegiatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan dengan anggaran sebesar Rp. 162.315.000,- terealisasi Rp. 161.857.000,- atau sebesar 99,79 %. Kecamatan Bayongbong. Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya Jumlah Plang Petunjuk LP2B sebanyak 94 buah, dan Sosialisasi LP2B sebanyak 94 desa. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya produksi tanaman padi sebanyak 676.259 ton;
- 8.3 Kegiatan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 5.567.816.001,56,- terealisasi Rp. 5.541.916.004,- atau sebesar 99,53 %. Kecamatan Malangbong, Banjarwangi, Singajaya, Pakenjeng, Karangtengah, Cihurip. Output dari kegiatan ini yaitu Jumlah Pengembangan Dam Parit Pertanian sebanyak 3 kegiatan,

Jumlah PIPANISASI Pertanian sebanyak 3 kegiatan, Jumlah Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian sebanyak 5 kegiatan, Jumlah Floating Pump sebanyak 4 unit, Pendataan dan Pemetaan Infrastruktur Pertanian sebanyak 4 dokumen. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya produksi tanaman padi sebanyak 676.259 ton;

- 8.4 Kegiatan IPDMIP (Integrited Partisipatory Development And Managemen Of Irrigatio Project) dengan anggaran sebesar Rp. 1.046.523.000,- terealissasi Rp. 901.620.700,- atau sebesar 86,15 %. Kecamatan Leles, Samarang, Tarogong Kidul, Cigedug, Banjarwangi, Cibalong, Caringin. Output dari kegiatan ini yaitu Jumlah dan Peserta Sekolah Lapang II sebanyak 12 kali, Jumlah dan Peserta Pertemuan Bulanan Review Penyuluh sebanyak 12 kali, Fasiltasi honor staf baru (Pendamping untuk 6 orang, Pengadaan Drum Plastik (Kapasitas 200 L) sebanyak 441 buah dan Pengadaan Peralatan Demonstrasi Caplak Jajar Legowo sebanyak 279 buah. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya produksi tanaman padi sebanyak 676.259 ton;
- 8.5 Kegiatan Pengembangan Sumber-Sumber Air (DAK Fisik) anggaran sebesar Rp. 1.840.000.000,- terealissasi Rp. 1.840.000.000,- atau sebesar 100 %. Kecamatan Banyuresmi, Cikelet, Bayongbong, Caringin, Pakenjeng, Cisewu, Banjarwangi, Tarogong Kaler, Samarang, Bungbulang, Karangtengah. Output dari kegiatan ini yaitu Jumlah Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 3 kegiatan, Jumlah Embung sebanyak 4 kegiatan dan Jumlah Dam Parit sebanyak 4 kegiatan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya produksi tanaman padi sebanyak 676.259 ton;
- 8.6 Kegiatan Peningkatan Prasarana Pemasaran Hasil Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 2.036.029.659,44,- terealissasi Rp. 2.023.839.659,- atau sebesar 99,40 %. Kecamatan Tarogong Kidul, Kadungora. Output dari kegiatan ini yaitu Peningkatan Bangunan Aspartan sebanyak 1 kegiatan, Detail Enginering Desain (DED) Miniatur Pertanian sebanyak 1 dokumen dan Dokumen Lingkungan Miniatur Pertanian sebanyak 1 dokumen. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya produksi tanaman padi sebanyak 676.259 ton;
- 8.7 Kegiatan Optimalisasi Lahan Melalui Pemanfaatan Sumber-Sumber Air anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealissasi Rp. 199.268.000,- atau sebesar 99,63 %. Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini yaitu Jumlah Pipa PVC sebanyak 3.050 batang. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya produksi tanaman padi sebanyak 676.259 ton;

9. **Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanian**

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 997.810.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 588.021.000,- atau sebesar 58,93 % yang diimplementasikan ke dalam, yaitu:

- 9.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh dengan anggaran sebesar Rp. 791.070.000,- terealissasi Rp. 504.835.000,- atau sebesar 63,82 %. Lokasi kegiatan ini adalah 42 Kecamatan se Kabuapten Garut. Output dari kegiatan ini yaitu Jumlah dan

peserta Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Aparatur sebanyak 256 orang, Jumlah dan peserta Penyusunan Programa Penyuluhan Tk. Kabupaten sebanyak 100 orang, jumlah dan peserta Penyusunan Programa Penyuluhan Tk. Kecamatan sebanyak 1050 orang, Jumlah dan Peserta Persiapan Bimbingan Teknis Sertifikasi Penyuluh sebanyak 82 orang, Tersedianya Honor THL-TBPP, Tersedianya Honor THL-TBPPD selama 12 bulan, Tersedianya Honor TTK Penyuluh sebanyak 3 orang, tersedianya honor operator Admin Simluhtan sebanyak 100 orang, Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh sebanyak 160 orang. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3.684.520 ton.

- 9.2 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan anggaran sebesar Rp. 71.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.160.000,- atau sebesar 76,28 %. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Kecamatan Leles, Samarang, Tarogong Kidul, Cigedug, Banjarwangi, Cibalong, Caringin se Kab. Garut Provinsi Jawa Barat. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Pendampingan Kegiatan IPDMIP sebanyak 1.053 OH. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya produksi padi sebesar 676.260 ton.
- 9.3 Kegiatan Pengembangan Pusat Edukasi Pertanian, dengan anggaran sebesar Rp. 84.493.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.026.000,- atau sebesar 34,36 %. Lokasi dari kegiatan ini yaitu Kecamatan Tarogong Kidul, Tarogong Kaler dan Garut Kota Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dan Peserta Pelatihan Terapan Teknologi Pertanian Bagi Generasi Muda sebanyak 80 peserta, Jumlah dan Peserta Jambore Edukasi Pertanian sebanyak 35 orang, Fasilitas Pelayanan dan Display Percontohan GEC sebanyak 1 kegiatan. Hasil dari kegiatan ini adalah produksi padi sebesar 676.259 ton.

10. **Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Dan Daya Saing Tanaman Perkebunan Berkelanjutan**

Program ini mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 819.366.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 815.337.950,- atau sebesar 99,51 % yang diimplementasikan kedalam kegiatan:

- 10.1 Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 178.450.000,- realisasi Rp. 177.005.850,- atau sebesar 99,19 %. Lokasi dari kegiatan ini adalah Kecamatan Samarang. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Produksi Benih Sebar Kopi Arabika sebanyak 25.000 benih, Kebun Benih Sebar Akarwangi yang tersedia dan/atau terpelihara seluas 1 hektar.. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya Produksi Kopi sebesar 2.820 ton.
- 10.2 Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan, dengan anggaran sebesar Rp. 395.731.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 394.311.000,- atau sebesar 99,64 %. Lokasi dari kegiatan ini adalah Kabupaten Garut. Output dari kegiatan ini adalah Solar Dryer Dome sebanyak 2 unit, Huller sebanyak 2 unit, Demplot Pengolahan Kopi sebanyak 2 angkatan. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Tanaman Perkebunan 2820 Ton

- 10.3 Kegiatan Pengembangan Agrowisata Tanamn Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 245.185.600,- realisasi sebesar Rp. 244.021.100,- atau sebesar 99,53 %. Lokasi kegiatan ini adalah Kecamatan Cisurupan dan Keamatan. Cikajang. Output dari kegiatan ini adalah Kajian Teknis Pengembangan Agrowisata Perkebunan sebanyak 1 dokumen, Peningkatan Kualitas Kebun Lokasi Agrowisata seluas 10 hektar. Hasil kegiatan ini adalah adanya produksi Kopi sebesar 2.820 ton.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

a. Ringkasan Kinerja Pencapaian Sasaran Renstra SKPD

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019 secara keseluruhan disajikan pada gambar 1. sebagai berikut :

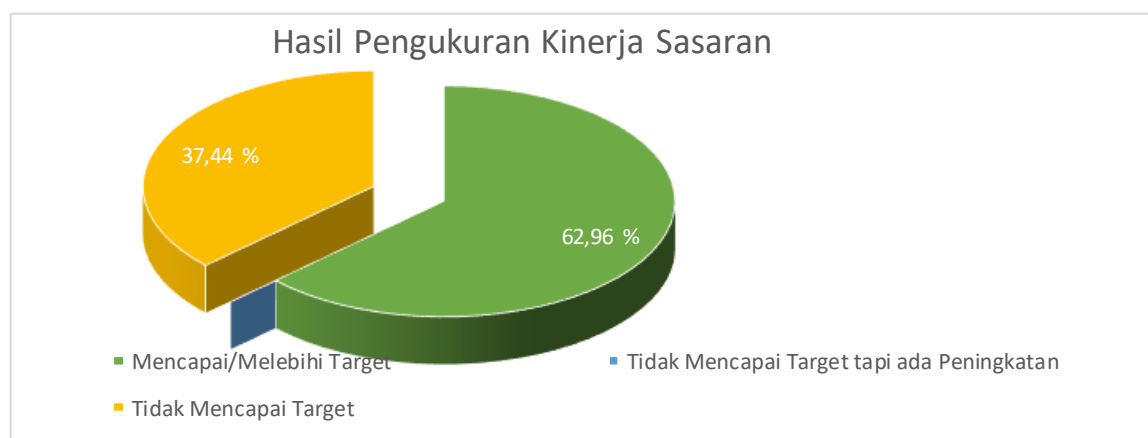
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2020 secara keseluruhan disajikan pada gambar 1. sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2020

Ringkasan Kinerja Pencapaian Sasaran Renstra SKPD									
No	Indikator Kinerja	Hasil 2018	Hasil 2019	Hasil 2020	Target 2020	Tingkat Capaian 2020 thd	Terca pail Tidak	Hasil sampai 2020	Target Renstra
1	Produksi Padi	994,726 Ton	824,494 Ton	732,048 Ton	680,260 Ton	107.61	√	732,048 Ton	703,719 Ton
2	produksi Jagung	619,381 Ton	489,309 Ton	586,701 Ton	498,861 Ton	117.61	√	586,701 Ton	519,066 Ton
3	Produksi kacang tanah	17,857 Ton	20,831 Ton	16,042 Ton	29,210 Ton	54.92	x	16,042 Ton	31,613 Ton
4	Produksi Ubi Kayu	490,354 Ton	497,055 Ton	396,488 Ton	545,548 Ton	72.68	x	396,488 Ton	567,643 Ton
5	Produksi Ubi Jalar	78,594 Ton	73,394 Ton	75,933 Ton	81,199 Ton	93.51	x	75,933 Ton	84,488 Ton
6	Produksi Cabai	150,919 Ton	100,096 Ton	142,704 Ton	152,458 Ton	93.60	x	142,704 Ton	158,167 Ton
7	Produksi Bawang Merah	29,009 Ton	32,857 Ton	28,422 Ton	29,299 Ton	97.01	x	28,422 Ton	30,489 Ton
8	Produksi kentang	180,567 Ton	163,704 Ton	126,413 Ton	182,373 Ton	69.32	x	126,413 Ton	189,778 Ton
9	Produksi Sayuran Lainnya	149,282 Ton	506,971 Ton	581,479 Ton	314,544 Ton	184.86	√	581,479 Ton	327,316 Ton
10	Produksi Jahe	14,407 Ton	16,087 Ton	10,840 Ton	7,085 Ton	153.00	√	10,840 Ton	7,373 Ton
11	Produksi Kunyit	5,857 Ton	3,041 Ton	7,091 Ton	3,609 Ton	196.48	√	7,091 Ton	3,755 Ton
12	Produksi Obat Lainnya	6,468 Ton	5,166 Ton	8,555 Ton	3,032 Ton	282.16	√	8,555 Ton	3,155 Ton
13	Produksi Jeruk	25,902 Ton	15,998 Ton	132,718 Ton	214,267 Ton	61.94	x	132,718 Ton	222,968 Ton
14	Produksi Buah Lainnya	110,507 Ton	141,058 Ton	191,013 Ton	171,180 Ton	111.59	√	191,013 Ton	147,448 Ton
15	Produksi Sedap malam	280,222 Tangka	335,355 Tangk	406,145 Tangk	283,024 Tangka	143.50	√	406,145 Tangka	294,156 Tangkai
16	Produksi Tanaman Hias Lainnya	90,366 Tangka	689,408 Tangk	659,698 Tangk	337,171 Tangka	195.66	√	659,698 Tangka	250,861 Tangkai
17	Produksi Kopi	7,755 Ton	2,949 Ton	3,042 Ton	2,820 Ton	107.87	√	3,042 Ton	2,860 Ton
18	Produksi Teh	3,723 Ton	3,722 Ton	3,937 Ton	743 Ton	529.88	√	3,937 Ton	750 Ton
19	Produksi tanaman tahunan dan penvegar	1,457 Ton	1,506 Ton	23,400 Ton	5,706 Ton	410.09	√	23,400 Ton	5,718 Ton
20	Produksi Atsiri	49 Ton	16 Ton	83 Ton	124 Ton	66.56	x	83 Ton	127 Ton
21	Produksi Tembakau	3,137 Ton	3,729 Ton	2,672 Ton	3,138 Ton	85.15	x	2,672 Ton	4,557 Ton
22	Produksi tanaman semusim dan rempah lainnya	866 Ton	865 Ton	4,365 Ton	4,553 Ton	95.87	x	4,365 Ton	3,170 Ton
23	Produksi produk olahan hasil tanaman pangan	626,677 Ton	508,465 Ton	503,004 Ton	420,120 Ton	119.73	√	503,004 Ton	437,128 Ton
24	Produksi produk olahan hasil hortikultura	9,213 Ton	6,139 Ton	11,354 Ton	6,850 Ton	165.75	√	11,354 Ton	2430 Ton
25	Produksi produk olahan hasil perkebunan	2,417 Ton	1,643 Ton	288 Ton	150 Ton	192.00	√	288 Ton	1700 Ton
26	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	63.00 %	79.00 %	79.00 %	76.00 %	103.95	√	79.00 %	85.00 %
27	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	83.75 %	86.11 %	85.11 %	71.00 %	119.87	√	85.11 %	80.00 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2020 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2020



Pada tahun 2020 , pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 27 (dua puluh tujuh) Indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator yang diukur, sebanyak 17 (tujuh belas) indikator (62,96 %) mencapai atau melebihi target, tetapi sebanyak 10 (sepuluh) Indikator (37,04 %) tidak mencapai target.

b. Pelaksanaan Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut Periode 2014-2019

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Garut Periode 2019-2024 yang diimplementasikan ke dalam 8 program Janji Bupati. Program/kegiatan Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dengan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Garut sebagai penanggungjawab pelaksanaan diantaranya berdasarkan jenis pupuk : 1). Pupuk Urea dari target sebanyak 51.137 ton terealisasi sebanyak 50.717 3ton atau sebesar 100,82 %, 2). Pupuk SP-36 dari target sebanyak 10.601 ton terealisasi sebanyak 10.519 ton atau sebesar 100,77 %, 3). Pupuk NPK dari target sebanyak 42.364 ton terealisasi 42.364 ton atau sebesar 99,99 %, 4). Pupuk ZA dari target sebanyak 14.031 ton terealisasi sebanyak 13,967 ton atau sebesar 100,46 %, dan 5). Pupuk Organik dari target sebesar 3.984 ton terealisasi 4.487 ton atau sebesar 88,78 %. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk

mengoptimalkan keberhasilan pencapaian diantaranya melalui optimalisasi fungsi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Apabila terjadi kelangkaan jenis pupuk bersubsidi di suatu kecamatan dapat mengalokasikan jenis pupuk bersubsidi dari kecamatan atau kios terdekat yang stock pupuk tersedia begitu pula lintas daerah atau kabupaten.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Isu-Isu Penting

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian;
3. Kelembagaan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
4. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian;
6. Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar;
7. Pelestarian dan pemanfaatan agens hayati dan pestisida nabati;
8. Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan;
9. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan; dan
10. Alih fungsi lahan pertanian.

b. Permasalahan dan Upaya Pemecahan

1) Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a) Alih fungsi lahan (sawah) dan kerusakan lingkungan yang cenderung semakin meningkat dan sulit dikendalikan
- b) Belum optimalnya pemanfaatan lahan
- c) Penurunan kualitas lahan (kesuburan tanah), akibat penggunaan pupuk kimia secara terus menerus
- d) Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit
- e) Penerapan teknologi panen dan pasca panen oleh petani masih rendah dan tingkat kerusakan waktu panen masih tinggi yang lebih disebabkan karena kurangnya sarana pendukung
- f) Penyediaan sarana produksi masih terbatas, harga sarana produksi

- cenderung semakin meningkat terutama untuk pupuk dan pestisida yang tidak diikuti dengan adanya kenaikan harga di tingkat petani
- g) Fenomena iklim/anomali iklim yang sulit diprediksi
 - h) Produktivitas padi, palawija dan hortikultura belum maksimal yang disebabkan oleh tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
 - i) Masih lemahnya dukungan infrastruktur terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani untuk kepentingan proses produksi dan pemasaran
 - j) Lemahnya pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi yang tertuang dalam peraturan Bupati, karena cenderung pembelian pupuk bersubsidi masih berpusat disentra-sentra ekonomi
 - k) Belum terbangunnya system perbenihan di daerah/desa secara terstruktur mengakibatkan lemahnya distribusi
 - l) Belum tertatanya kelembagaan usaha tani sehingga belum berperan sesuai harapan dalam menjalankan fungsinya menjalin kemitraan, baik aspek pemasaran, permodalan maupun pengembangan usahanya
 - m) Kelembagaan petani belum berbadan hukum
 - n) Tingginya fluktuasi harga sulit dikendalikan sebagai akibat dari fluktuasinya permintaan dan penawaran produk yang disebabkan oleh berbagai factor seperti kekurangan pasokan pada musim tertentu atau kelebihan pasokan pada musim panen raya
 - o) Persyaratan anggungan kredit petani sangat memberatkan

2) Upaya Pemecahan

Upaya untuk pemecahan permasalahan di atas antara lain:

- a) Sosialisasi peraturan perundangan-undangan alih fungsi lahan terhadap stakeholder dan masyarakat;
- b) Penentuan alokasi luas lahan pertanian pada penyusunan RTRW;
- c) Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang berwawasan lingkungan;
- d) Meningkatkan penanganan rawan bencana longsor pada daerah-daerah rawan longsor melalui kegiatan pelatihan konservasi untuk peningkatan kualitas SDM petani disekitar daerah konservasi lahan dan konservasi daerah aliran sungai dan pengadaan bibit tanaman buah-buahan untuk ditanam disekitar daerah konservasi;
- e) Meningkatkan produktivitas lahan dan lahan tidur melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau intensitas tanam dan

peningkatan produktivitas berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura;

- f) Diversifikasi usaha petani ke agroindustri melalui peningkatan kualitas dan daya saing hasil produk pertanian dengan cara pelatihan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian untuk peningkatan kualitas SDM petani dan pengadaan sarana dan prasarana seperti peralatan dan mesin yang berstandar SNI sesuai dengan GAP, GHP, GMP dan HCCP dan penguatan sarana pendukung pengolahan hasil;
- g) Melakukan pemberian hibah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan sarana produksi untuk kegiatan usahatani sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- h) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan SLPTT, SLPHT, SRI, penerapan budidaya sesuai SOP/GAP dan SLI (Sekolah Lapang Iklim) untuk mengantisipasi dampak fenomena iklim/perubahan cuaca yang tidak menentu;
- i) Melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur terutama jaringan irigasi desa dan jalan usaha tani.

c. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

1. Tantangan Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Berdasarkan analisa indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, analisa Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan analisis KLHS, maka tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- ✓ Alih fungsi lahan khususnya sawah kerusakan lingkungan terus meningkat.
- ✓ Pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat yang sesuai dengan spesifik lokasi belum optimal.
- ✓ Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan serta ramah lingkungan belum optimal.
- ✓ Pendukung infrastruktur jaringan irigasi desa, jalan usahatani dan jalan produksi masih belum optimal.
- ✓ Koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.

2. Peluang Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut

Peluang pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ✓ Sosialisasi dan implemtasi Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- ✓ Penyediaan benih tananam pangan dan hortikultura yang bersertifikat sesuai dengan spesifikasi lokasi masih dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut.
- ✓ Pengembangan teknologi tepat guna yang memanfaatkan benih bersertifikat dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih dapat dikembangkan.
- ✓ Pengembangan infrastruktur khususnya jaringan irigasi desa, jalan usahatani dan jalan produksi masih dapat ditingkatkan.
- ✓ Stakeholder pembangunan pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas masih dapat didayagunakan sesuai dengan tugas masing-masing.

d. Formulasi Isu-Isu Penting

Berdasarkan hasil evaluasi ada beberapa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

CATATAN STRATEGIS	SKPD	TANGGAPAN DINAS PERTANIAN
<p>Terkait dengan upaya peningkatan produksi serta nilai tambah dan keragaman komoditas pertanian, perikanan dan kelautan maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :</p> <p>Pemerintah harus berupaya untuk dapat mengurangi terjadinya alih fungsi lahan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas hasil produksi maupun tingkat produktifitasnya</p>	<p>Dinas Pertanian</p>	<p>Dalam upaya untuk mengurangi terjadinya alih fungsi lahan, dinas pertanian kabupaten garut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Anggaran APBD Kabupaten Garut Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Program Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Dengan Rincian Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> A. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di pusat kegiatan lokal perkotaan Garut, dan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, Yang di dalamnya memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang menetapkan kawasan peruntukan pertanian lahan basah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan sebagian peruntukan pertanian lahan kering sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

		<p>B. SOSIALISASI</p> <p>DILAKSANAKAN Meliputi Pertemuan Dengan Aparat Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Serta Pemasangan Plang/ Peta Petunjuk KP2B di masing-masing Desa/Kelurahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun Anggaran 2020 meliputi 94 (sembilan puluh empat desa di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan, Karangpawitan, Sucinaraja, Bayongbong, Cilawu, Banyuresmi, Leles Dan Samarang. - Rencana Tahun Anggaran 2021 Di 73 (tujuh puluh tiga) Desa Di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Wanaraja, Pangatikan, Sukawening, Karangtengah, Cibatu, Kersamanah Dan Malangbong. <p>C. Sosialisasi dan pemasangan plang/peta petunjuk KP2B di masing-masing desa/kelurahan akan terus dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2024 seluruh desa dan kelurahan akan mendapat peta/plang petunjuk KP2B.</p> <p>2. Dalam upaya mengendalikan lahan LP2B tidak beralih fungsi dinas pertanian melakukan insentif berupa alokasi anggaran dan kegiatan baik apbn maupun APBD ke lokasi lahan LP2B seperti perbaikan dan</p>
--	--	--

		pengembangan infrastruktur pertanian dan bantuan sarana benih dan alsintan serta alokasi pupuk bersubsidi.
--	--	--

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menetapkan rancangan rencana kerja Tahun 2022, Dinas Pertanian Kabupaten Garut wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain : forum musyawarah koordinasi perencanaan seperti : MUSRENBANGNAS di tingkat Nasional, MUSRENBANG di tingkat Propinsi, MUSRENBANG di tingkat Kabupaten/Kota, MUSRENBANG Kecamatan dan MUSRENBANG tingkat Desa, forum – forum lintas pelaku, dan konsultasi publik. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Garut maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum – forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. Pada akhir tahun anggaran 2020, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya; Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menetapkan rencana kerja Tahun 2022, Dinas Pertanian Kabupaten Garut menampung berbagai usulan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat seperti pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan desa, asosiasi-asosiasi, kelompok tani serta masyarakat tani.

Usulan-usulan tersebut diperoleh antara lain melalui :

- a. Musrenbang Tingkat Kabupaten
- b. Musrenbang Tingkat Kecamatan
- c. Audensi dari Asosiasi-asosiasi
- d. Rembug Tani
- e. Pembinaan terhadap kelompok tani

Berdasarkan data hasil usulan masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian Tahun 2022. Kegiatan – kegiatan yang diusulkan mengarah pada 3 program yaitu Program Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian; Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian serta Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Adapun Kegiatan pada masing-masing program tersebut adalah :

- a. Program Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian :
 - Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian;
 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian :
 - Pembangunan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian :
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan RKP Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. RPJMD Kabupaten Garut merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Garut tahunan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2021, sedangkan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tema Perencanaan Pembangunan Pusat – Daerah Tahun 2022 mengalami perubahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berimbas ke seluruh negara, tidak terkecuali di Kabupaten Garut. Sebelum ada pandemi Covid-19 Tema RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah “Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Dan Infrastruktur Yang Mantap Disertai Perluasan Investasi Guna Peningkatan Daya Saing Daerah”. Adapun perubahan setelah Covid-19 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial”.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah :

1. Meningkatkan produksi komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Mendorong majunya agroindustri tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD.

Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah :

1. Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

1. Rencana Program

Sesuai dengan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 kemudian diatur melalui Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan dimutakhirkan oleh Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 serta tema pembangunan Kabupaten Garut tahun 2022 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial, program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian;
3. Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian;

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

Dalam mendukung terwujudnya RPJMD 2019–2024 Kabupaten Garut, program nasional yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan;
2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
3. Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan;
4. Program Penyediaan Prasana dan Sarana Pertanian Yang Sesuai Kebutuhan;
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian;
6. Pendidikan Peranian.

2. Rencana Kegiatan

Dalam mewujudkan kebijakan dan program tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui kegiatan program daerah dan nasional.

A. Kegiatan Program Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 1.3. Administrasi Barang Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan dan Penyediaan Sarana Pertanian
- 2.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- 2.2. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman.
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3. Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian
- 3.1. Pengembangan Prasarana;
- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
 - Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
 - Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan.
- 3.2. Pembangunan Prasarana Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- 4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis;
 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - 5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian;
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian
 - 6.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - Pembentukan Badan Usaha Milik Petani;
 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

B. Kegiatan Program Nasional

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan :
 - Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
 - Kegiatan Pengelolaan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
 - Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
 - Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.
2. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
 - Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - Kegiatan Peningkatan Produksi Buah-buahan dan Florikultura.
3. Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing Perkebunan
 - Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
 - Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah;
 - Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan.
4. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian Yang Sesuai Kebutuhan
 - Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
 - Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
 - Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian.
5. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian
 - Kegiatan Pemantapan Kinerja Penyuluh Pertanian.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana Pendanaan Indikatif

Kegiatan pembangunan pertanian sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Garut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan keterpaduan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Swasta dan sumber-sumber lain dana pembangunan lainnya.

Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut guna tercapainya program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel IV.1. Rencana Pendanaan Indikatif Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2022

Tahun	Rencana APBD II	Pertumbuhan	Rencana APBD I	Pertumbuhan	Rencana APBN	Pertumbuhan
2020	70.982.000.000	10,00	31.522.783,000	10,00	284.648.005.000	10,00
2021	91.298.475.000	10,00	35.025.315.000	10,00	316.275.561.000	10,00
2022	97.020.724.000	10,00	38.527.846.000	10,00	347.903.117.000	10,00
2023	101.106.305.000	10,00	42.365.897.000	10,00	382.765.098.000	10,00
2024	106.998.806.000	10,00	46.678.965.000	10,00	400.327.987.000	10,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari s/d 31 Desember 2022 meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2022 ini menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dibidang pertanian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Garut “Garut yang bertaqwa, maju dan sejahtera”.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN